

# REKONSTRUKSI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERWAWASAN HAM

Kasinyo Harto

Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang

Email: masyo\_71@yahoo.com

## **Abstract**

*This working paper discusses the need for human rights insight in the learning of Islamic religious education. The emergence of many violations of human rights values, such as the case of conflict among students, bullying, disturbance, conflicts and violence, and so forth, is a shining example of powerlessness of an educational system in this country, specifically Islamic religious education. It is sure that there is something wrong in procedure and mechanism of religious education. After analyzing it in depth, author designed a systemic methodology of teaching of Islamic Religious Education with human rights insight.*

## مستخلص

هذه المقالة باحثة عن الاحتياج إلى فهم حقوق الإنسانية في التربية الدينية الإسلامية. أن نشأة المخالفات الكثيرة في قيم حقوق الإنسانية هي وصفة ضعف المناهج التربية بهذه الدولة وخاصها التربية الدينية الإسلامية، كمسألة المشاجرة بين الطلاب و التشويش و الفوضى و الصراع و الشدة و ما أشبه ذلك. فطبعا، أن في الإجراءات و تقنية التربية الدنية خطأ. و في التحليل العميق أن الكاتب وتّد علم المنهج النظامي للتربية الدينية الإسلامية في نظرة حقوق الإنسانية.

**Keywords:** Pendidikan, Agama Islam, Kurikulum, Hak Asasi Manusia

## **A. Pendahuluan**

Sejalan dengan arus perubahan, kemajuan iptek, munculnya berbagai masalah sosial dan moralitas keagamaan, telah membawa banyak orang untuk

mempersoalkan peran pendidikan, khususnya pendidikan agama. Apa yang salah dengan - dan dalam - sistem pendidikan agama? Apakah pembelajaran pendidikan agama yang berlangsung selama ini tidak berhasil membina peserta didik menjadi manusia beragama, berbudi mulia sebagai individu maupun masyarakat sebagaimana dicita-citakan oleh bangsa Indonesia?

Tidak dapat dipungkiri, bahwa munculnya banyak pelanggaran terhadap nilai-nilai HAM, seperti kasus tawuran antar pelajar, *bullying*, kerusuhan, konflik dan kekerasan (*violence*), dan lain sebagainya, untuk sebagian, adalah cermin ketidakberdayaan sistem pendidikan di negeri ini, khususnya pendidikan agama. Ketidakberdayaan sistem pendidikan agama di Indonesia, sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional kita secara keseluruhannya, tampaknya disebabkan oleh pendidikan agama selama ini lebih menekankan pada proses transfer ilmu agama kepada anak didik, bukan pada proses transformasi nilai-nilai luhur keagamaan kepada anak didik untuk membimbingnya agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan berakhlak mulia.

Dalam konteks ini Romo Mangunwijaya, dengan nada menggugat ia berucap, pendidikan agama kita saat ini masih mementingkan huruf daripada roh, lebih mendahulukan tafsiran harfiah di atas cinta kasih. Apakah pola pendidikan agama semacam itu punya hak ada di dalam masyarakat yang semakin dewasa, dengan masalah-masalahnya yang semakin kompleks.<sup>1</sup> Sayangnya tidak semua edukator agama benar-benar sadar akan persoalan ini. Sementara Ahmad Najib Burhani menyatakan, bahwa mengapa pendidikan agama di Indonesia begitu mandul dan tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap peserta didik, karena nilai-nilai agama tidak ditransformasikan secara positif, kritis dan berorientasi ke depan. Ia sekedar menjadi ornamen pendidikan yang tidak memiliki fungsi kecuali sebagai pajangan ruangan kurikulum pendidikan nasional.<sup>2</sup>

Hal senada diungkap oleh Amin Abdullah, menurutnya pembelajaran pendidikan agama yang berjalan hingga sekarang lebih banyak terfokus pada

---

<sup>1</sup> Widyastuti, "Mendiskusikan Pendidikan Pemanusiaan", *Kedaulatan Rakyat*, 3 Mei 2002.

<sup>2</sup> Ahmed Najib Burhani, *Islam Dinamis Menggugat Peran Agama Membongkar Dokirin yang Membatu*, (Jakarta: Kompas, 2001), hal. 205.

persoalan-persoalan teoritis keagamaan yang bersifat kognitif semata. Pendidikan agama terasa kurang terkait atau kurang *concern* terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang bersifat kognitif menjadi "makna" dan "nilai" yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik lewat berbagai cara, media dan forum. Selanjutnya "makna" dan "nilai" yang telah terkunyah dan terhayati tersebut dapat menjadi sumber motivasi bagi peserta didik untuk bergerak-berbuat-berperilaku secara konkrit agamis dalam wilayah kehidupan praksis sehari-hari.<sup>3</sup>

Dari ungkapan-ungkapan sebagaimana terurai di atas, dapat dimengerti bahwa pendidikan agama termasuk pendidikan agama Islam yang berlangsung hingga sekarang, tampaknya masih terjebak dalam, pengajaran ranah kognitif dogmatis yang sibuk mengajarkan pengetahuan peraturan dan hukum agama dengan disiplin ilmu fiqh yang menjadi orientasinya (*fiqh orientid*) sehingga fiqh dianggap sebagai agama itu sendiri. Selain itu pembelajaran pendidikan agama Islam masih banyak memfokuskan pada isi atau muatan materi yang harus ditransfer kepada peserta didik dengan dalil-dalil dan dogma-dogma yang tidak menyentuh realita kehidupan, dan bukannya pada proses dan metodologi.

Berangkat dari problematika tersebut, tanpa mengurangi sedikitpun jerih payah para edukator agama Islam di pesantren-pesantren, sekolah-sekolah, masjid-masjid, majlis-majlis taklim, rumah-rumah ibadah, dan rumah-rumah, tampaknya meninjau ulang serta mendiskusikan kembali persoalan-persoalan yang terkait dengan proses pembelajaran pendidikan agama Islam sebagai instrument pembangunan dan penanaman nilai-nilai HAM merupakan persoalan penting dan mendesak untuk dikedepankan.

## B. Sekilas Wajah Pendidikan Agama Islam Kini

Komaruddin Hidayat dalam sebuah pengantar pada buku teks Pendidikan agama Islam memaparkan, bahwa ada tiga hal yang dapat membuktikan kekurang tepatan orientasi pendidikan agama Islam di tanah air tercinta ini.

---

<sup>3</sup> Amin Abdullah, "Problem Epistemologis-Metodologis Pendidikan Agama", dalam Munir Mulhan, dkk, *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren, Religiusitas Iptek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) hal. 59-59.

*Pertama*, pendidikan agama Islam saat ini lebih berorientasi pada belajar tentang agama (*transfer of knowledge*). Karena itu, tidak aneh kalau di negeri ini sering kita saksikan seseorang yang banyak mengetahui tentang agama, tapi perilakunya tidak relevan dengan nilai-nilai agama yang diketahuinya.

*Kedua*, tidak tertibnya dalam penyusunan dan pemilihan materi-materi pendidikan agama sehingga sering ditemukan hal-hal yang prinsipil yang seharusnya dipelajari lebih awal, malah terlewatkan. Kekacauan materi pendidikan agama ini terlebih jelas, lagi terlihat pada disiplin ilmu fiqh yang menjadi orientasinya (*fiqh oriented*) sehingga ilmu fiqh dianggap sebagai agama itu sendiri. *Ketiga*, kurangnya penjelasan yang luas dan mendalam serta kurangnya penguasaan semantik dan generik atas istilah-istilah kunci dan pokok dalam ajaran agama. Sehingga sering ditemukan penjelasan yang sudah sangat jauh dan berbeda dari makna, spirit dan konteksnya. Karena itu lanjut Komar, orientasi pendidikan agama Islam yang berlangsung hingga sekarang perlu ditinjau ulang secara kritis untuk menemukan orientasi pendidikan agama yang lebih tepat dan berdaya guna.<sup>4</sup>

Apabila, dikaitkan dengan kerangka tinjauan epistemologis-metodologis, pendidikan agama Islam yang sekarang berjalan, agaknya lebih menitikberatkan pada pendekatan naturalistik-positivistik, yakni jenis pendekatan keilmuan yang lebih menitikberatkan pada aspek koherensi kognitif (dengan indikator, dapat terjawabnya berbagai pertanyaan pengetahuan agama, yang bahannya disusun dan tersistematisasikan sebelumnya sedemikian rupa), tanpa banyak menyentuh wilayah moralitas praktis. Atau setingkat lebih tinggi yakni menitik beratkan pada aspek korespondensi-tekstual yang lebih menekankan pada kemampuan anak didik untuk menghafal teks-teks keagamaan yang sudah ada.<sup>5</sup>

Ditinjau dari aspek metodologi, proses pendidikan agama Islam yang berlangsung hingga, sekarang masih lebih banyak *top down* atau deduktif dan membawakan kebenaran agama, dari atas, sehingga, kurang menghiraukan kenyataan-kenyataan yang unik dan melibatkan dengan kebutuhan kescharian.

---

<sup>4</sup> Komarudin Hidayat, *Memetakan Struktur Keilmuan Islam: Sebuah Pengantar*, 1999, hal. xi-xviii.

<sup>5</sup> Fazlur Rahman, *Alam*, (Chicago: The University of Chicago Press 1979), hal. 191.

Pada aspek materi, tampak masih lebih dominan aspek ritualnya dengan disiplin ilmu fiqh sebagai pilihan. Pendekatan yang digunakan pun sangat normatif dan dogmatik, sehingga kehadiran pelajaran pendidikan agama Islam terasa, membosankan dan kurang menantang.

Menurut Azyumardi Azra, ada beberapa persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam sekarang ini, diantaranya adalah krisis metodologi atau krisis pedagogik. Sekarang ini semakin tinggi kecenderungan pola pelaksanaan pendidikan agama Islam, bahwa yang terjadi adalah lebih merupakan *proses teaching*, proses pengajaran, ketimbang *proses learning*, proses pendidikan. Lebih lanjut Azra menjelaskan, bahwa proses pengajaran pendidikan agama Islam hingga sekarang hanya mengisi aspek kognitif/intelektual, tapi tidak mengisi aspek pembentukan pribadi dan watak.<sup>6</sup>

Aspek lain dari krisis metodologi ini adalah, bahwa pola, pengajaran pendidikan agama Islam yang berlangsung hingga sekarang, lebih sesuai dengan apa yang disebut oleh Paulo Freire sebagai *banking concept of education*. Jadi, anak didik itu di *banking*; kita taruh investasi, kita suapkan anak didik itu, sehingga mereka tidak memikirkan apa-apa lagi. Proses pendidikan agama Islam yang berlangsung adalah *banking concept of education*, ketimbang *problem posing of education*, yaitu menawarkan persoalan-persoalan yang problematis dan menuntut anak didik untuk berpikir kreatif dalam memecahkannya.<sup>7</sup>

Selama ini yang terjadi ialah proses pasif, di mana anak didik hanya mendengar dan menerima dari guru atau dosennya tanpa ada unsur kreatifitas. Kecenderungan ini berkaitan juga dengan implikasi lebih lanjut dari *banking concept of education*; dosen ataupun guru lebih menekankan pada memorisasi, menekankan hafalan ketimbang pemikiran kritis. Sehingga peserta didik yang baik menurut sistem pembelajaran seperti ini adalah anak yang penurut, tidak kritis serta mematuhi aturan yang sudah ada.

Hemat penulis, pola pendidikan agama Islam yang semacam itu tidak akan mampu berperan menanamkan nilai-nilai fundamental bagi pembentukan

---

<sup>6</sup> Azyumardi Azra, "Rekonstruksi Kritis Ilmu dan Pendidikan Islam", hal. 84-86.

<sup>7</sup> Paulo Friera, *Pedagogi Pengharapan*, alih bahasa A. Widyamartaya, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hal. 196.

sikap keagamaan peserta didik. Model pengajaran pendidikan agama yang cenderung normatif-dogmatis dengan fokus utama kognitif dapat dipastikan tidak akan mampu menjadi pembimbing, oasis dan sumber motivasi yang handal bagi Kajian-kajian bagaimana sesungguhnya pendidikan agama Islam dilaksanakan dalam, situasi dan zaman yang terus berkembang dan berubah perlu mendapat perhatian. Demikian pula kemungkinan perlunya perubahan metodologi, jika memang obyek sasaran pendidikan agama Islam yang terus berubah.

Proses pengajaran pendidikan agama Islam sebagaimana berlangsung yang bersandar pada bentuk metodologi yang bersifat statis-indoktrinatif-doktriner, tidaklah menarik bagi peserta didik dan akan cepat membosankan. Demikian juga dengan muatan materi ajarnya yang syarat dengan aturan-aturan normative-legalistik-formalistik mengabaikan dimensi afeksi dipastikan tidak akan dapat mencapai tujuan dari pembelajaran pendidikan agama Islam itu sendiri. Karena itu perlu dicari pendekatan baru sehingga isi dan metodologi pendidikan agama Islam menjadi aktual-kontekstual. Para edukator hendaknya menggunakan metodologi pengajaran yang dapat memberikan dorongan bagi bakat dan pemikiran peserta didik. Dengan demikian pelaksanaan pendidikan agama Islam akan relevan dan sesuai dengan gerak perubahan dan tuntutan zaman serta bermanfaat bagi peserta didik sebagai instrument penanaman nilai-nilai HAM yang pada gilirannya akan berkontribusi untuk pembangunan karakter bangsa (*character nation building*). Sampai disini, kiranya cukup sebagai alasan untuk meneliti dan menelaah ulang bagaimana proses pendidikan agama Islam di lapangan. Jika tidak, dikhawatirkan justru misi utama yang hendak diemban oleh pendidikan agama Islam, yakni untuk mentransfer nilai-nilai agama kepada peserta didik dan masyarakat pada umumnya justru malah tidak atau kurang mencapai sasaran.

### **C. Tahapan dalam Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam**

Berbeda dengan bidang-bidang studi lainnya, pendidikan agama Islam mempunyai cakupan yang unik dalam tahapan pembelajarannya. Tahapan-tahapan itu adalah kognisi, afeksi dan psikomotor. Ketiga tahapan, tersebut

harus dimiliki dan dilami oleh anak didik bersama-sama dengan, guru dan dosen.

Tahapan pertama yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran, Pendidikan agama Islam adalah mentransfer atau memberikan pengetahuan, keagamaan sebanyak-banyaknya kepada anak didik. Dalam kegiatan ini aspek kognisi anak didik menjadi sangat dominan. Tahapan berikutnya selain memenuhi harapan pada tahapan pertama, proses internalisasi nilai keagamaan diharapkan dapat juga terjadi. Aspek afeksi dalam pendidikan agama, utamanya terkait erat dengan aspek yang pertama. Sebenarnya, dalam pendidikan agama aspek yang kedua ini perlu mendapat perhatian lebih daripada tahapan pertama. Walaupun tahapan kedua tersebut sudah mendapat prioritas dan memperoleh porsi yang memadai, masih ada satu tahapan lagi yang hendak dicapai oleh pendidikan agama Islam, yakni aspek psikomotorik. Aspek atau tahapan ini lebih menekankan kemampuan anak didik untuk dapat menumbuhkan motivasi dalam diri sendiri sehingga dapat menggerakkan, menjalankan, dan menatai nilai-nilai dasar keagamaan yang telah terinternalisasikan dalam dirinya sendiri lewat tahapan kedua. Dari situ tampak bahwa bidang studi pendidikan agama yang dilaksanakan lewat jalur pendidikan jauh berbeda dari jenis bidang studi lainnya yang juga dilaksanakan lewat jalur pendidikan

Bidang studi pendidikan agama tidak boleh hanya berhenti dan hanya terbatas pada wilayah kognisi seperti yang lazim terjadi pada bidang-bidang studi tertentu. Jadi pendidikan agama Islam di samping memiliki transmisi yang sama dengan bidang-bidang studi lainnya (*transfer of knowledge*), juga memiliki saluran transformasi nilai (*transfer of values*) dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya sesuai dengan landasan transendental yang mengikat dan sangat kuat dalam pengajarnya. Terjadinya proses transformasi dalam kehidupan anak didik adalah tujuan utama pendidikan agama dan kesuksesan pembelajaran pendidikan agama harus tercermin pada tindakan individu dan tindakan sosial yang konkrit dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat.

Hal senada diungkap oleh Muhaimin, bahwa ada beberapa dimensi/ tahapan yang hendak, ditingkatkan dan dituju oleh kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu (1) dimensi keimanan peserta didik terhadap, ajaran agama Islam; (2) dimensi pemahaman atau penalaran (*intelektual*) serta keilmuan peserta didik terhadap ajaran agama Islam, (3) dimensi penghayatan atau pengalaman batin yang dirasakan peserta didik dalam menjalankan ajaran Islam; dan (4) dimensi pengamalannya, dalam arti bagaimana ajaran Islam yang telah diimani, dipahami dan dihayati atau diinternalisasi oleh peserta didik itu mampu menumbuhkan motivasi dalam dirinya untuk menggerakkan, mengamalkan, dan menaati ajaran agama Islam dan nilai-nilainya dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.<sup>8</sup>

Sebagai catatan masih dalam kaitan dengan tahapan pelaksanaan pendidikan agama, selain teori *taxonomy* dari Benjamin S. Bloom dkk sebagaimana telah terurai di atas, hemat penulis, empat pilar pendidikan yang diperkenalkan UNESCO mulai tahun 1997 sangat relevan dan patut pula mendapat perhatian kita untuk dikaji dielaborasi dan dikembangkan dalam upaya pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam sebagai instrument penanaman nilai-nilai HAM.

Empat pilar pendidikan (*The four pillar of education*) yang dimaksud amat sangat erat kaitannya dengan pembelajaran pendidikan agama dalam kaitannya sebagai instrument penanaman nilai-nilai HAM, yaitu *learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be*, untuk mengantisipasi perubahan yang bukan hanya linier tetapi mungkin eksponensial yang diantisipasi akan terjadi dalam masyarakat yang menggelobal. Keempat kemampuan ini dimulai dari belajar untuk mengetahui. Setelah dapat belajar untuk mengetahui, diharapkan anak didik dapat menerapkannya (*learning to do*). Selain dapat menerapkan apa yang diketahui, peserta didik diharapkan dapat bersikap harmoni terhadap lingkungan (*live together*) dan pada akhirnya dapat menghantarkan peserta didik memiliki keperibadian yang humanis dan religious (*learning to be*).

---

<sup>8</sup> Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), hal. 78-79.



#### **D. Prinsip-Prinsip Paradigmatis Nilai-Nilai HAM dalam PAI**

Sebelum masuk ke ranah pendidikan Islam, diskursus ini akan bermula dari definisi Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah tuhan yang dibawa sejak lahir. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan.

Walau demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain, ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia secara kodrati sebagai anugerah dari tuhan, mencakup hak hidup, hak kemerdekaan/kebebasan dan hak memiliki sesuatu.

Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama. Dengan pengakuan akan prinsip dasar tersebut, setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia. Jadi, kesadaran akan adanya hak asasi manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat. Pengakuan terhadap HAM memiliki dua landasan, sebagai berikut.

1. Landasan yang langsung dan pertama, yakni kodrat manusia. Kodrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya. Semua manusia adalah sederajat tanpa membedakan ras, agama, suku, bahasa, dan sebagainya.
2. Landasan yang kedua dan yang lebih dalam: Tuhan menciptakan manusia. Semua manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama yaitu tuhan yang maha esa. Karena itu di hadapan tuhan manusia adalah sama kecuali nanti pada amalnya.

Berbicara tentang Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam kaitannya sebagai instrument penanaman nilai-nilai HAM, maka tidak dapat dipisahkan

dari diskursus bagaimana konsep Islam tentang HAM itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa Islam adalah agama universal yang mengajarkan keadilan bagi semua manusia tanpa pandang bulu. Sebagai agama kemanusiaan, Islam meletakkan manusia pada posisi yang sangat mulia. Manusia digambarkan oleh al-Qur'an sebagai makhluk yang paling sempurna dan harus dimuliakan. Bersandar dari pandangan tersebut, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM dalam Islam tidak lain merupakan tuntutan dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap pemeluknya. Dalam Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Abu A'la al-Maududi, HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat kekal dan permanen.

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa secara normatif konsepsi Islam tentang nilai-nilai HAM sangat lugas dan dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam, al-Qur'an dan al-Hadits. Adapun implementasi nilai-nilai HAM dapat dirujuk pada praktik kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW, yang populer dengan istilah *Sunnah* (tradisi) nabi Muhammad.

Dalam konteks membangun pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis HAM sebagai subyek studi, terdapat beberapa asumsi paradigmatik PAI dalam kaitan dengan prinsip-prinsip pokok HAM.

*Pertama*, Penanaman sikap belajar Hidup dalam Perbedaan. Nilai-nilai budaya, tradisi, dan kepercayaan senantiasa mengiringi pemeliharaan dan pengasuhan seorang anak. Ketika ia mulai masuk sekolah nilai-nilai yang terbentuk dari dalam pengasuhan dalam keluarga ini terus ia bawa. Maka setiap anak memiliki latar belakang dan nilai-nilai yang berbeda pula. Ini realitas yang harus dipertimbangkan dalam pembelajaran PAI. Perbedaan nilai-nilai ini meniscayakan PAI tidak hanya berpijak pada paradigma *learning to know, learning to do, learning to be*, tetapi juga *learning to live together*. Paradigma yang disebut terakhir ini dalam konteks PAI akan menjadikan pembelajaran PAI sebagai proses: (a) pengembangan sikap toleran, empati, dan simpati yang menjadi syarat utama suksesnya koeksistensi dalam keragaman agama;

(b) klarifikasi nilai-nilai kehidupan bersama menurut perspektif agama-agama; (c) pendewasaan emosional; (d) kesetaraan dalam partisipasi; (e) kontrak social baru dan aturan main kehidupan bersama antaragama.

Sebagai contoh untuk Penanaman sikap belajar Hidup dalam Perbedaan adalah tentang kebebasan beragama. Di sekolah, siswa akan belajar berbagai matapelajaran di kelas-kelas heterogen bersama siswa lain yang berbeda agama dan belajar secara homogen dalam matapelajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pada saat-saat seperti ini perlu diberikan pengertian kepada siswa muslim tentang Islam dan Kebebasan beragama dalam konteks heterogenitas keberagaman di Indonesia. Kebebasan berkeyakinan merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat sarat dengan prinsip universal HAM tentang kebebasan manusia untuk beragama atau sebaliknya. Karenanya, pemaksaan keyakinan beragama tidak saja bertentangan dengan prinsip HAM, tapi juga tidak pernah diajarkan oleh Islam (QS.2: 256). Ajaran berdakwah dalam Islam harus dilakukan dengan cara-cara bijak dan dialogis, dan harus menghindari hal-hal yang bersifat menistakan ajaran, simbol, dan tokoh-tokoh agama lain.

Dalam perspektif membangun toleransi antarumat beragama, ada lima prinsip yang bisa dijadikan pedoman semua pemeluk agama dalam kehidupan sehari-hari: (1) Tidak ada satupun agama yang mengajarkan penganutnya untuk menjadi jahat; (2) Adanya persamaan yang dimiliki agama-agama, misalnya tentang berbuat baik kepada sesama; (3) Adanya perbedaan mendasar yang diajarkan agama-agama. Di antaranya, perbedaan kitab suci, Nabi, dan tata cara beribadah; (4) Adanya bukti kebenaran agama; dan (5) Tidak boleh memaksa seseorang menganut suatu agama atau suatu kepercayaan. Bersandar pada lima prinsip ini, hal yang harus lebih ditunjukkan oleh semua umat beragama adalah untuk melihat persamaan-persamaan dalam agama yang diyakini seperti dalam hal perdamaian dan kemanusiaan. Hal ini jauh lebih bermanfaat dari pada berkuat dalam perdebatan akan hal-hal yang berbeda dai ajaran agama dengan semangat menguji keyakinan sendiri dan enggan keyakinan orang lain. Perbedaan, dalam hal apapun; adalah rahmat Tuhan yang harus disyukuri, karena jika Tuhan

menghendaki keseragaman, niscaya Dia dapat melakukannya. Perbedaan hendaknya dijadikan media untuk berlomba dalam lapangan kemanusiaan dan pendegakan keadilan.<sup>9</sup>

*Kedua*, Pembelajaran membangun saling percaya. Penguatan kultural masyarakat memerlukan modal social yang dibangun dari rasa saling percaya. Modal social adalah seperangkat nilai atau norma informal yang dimiliki bersama suatu masyarakat yang mendorong terjadinya kerjasama satu sama lain. Norma yang dapat menjadi modal social adalah norma yang menonjolkan kebaikan-kebaikan. Norma semacam inilah yang akan membangun rasa saling percaya antara satu anggota masyarakat dengan anggota yang lain. Pembelajaran PAI yang mengedepankan nilai-nilai HAM harus mengusung norma-norma kebaikan yang merupakan modal social untuk tumbuhnya rasa saling percaya antar anggota masyarakat. Proses pembelajaran PAI berbasis HAM perlu menanamkan *mutual trust* atau saling pengertian antaragama, budaya dan etnik.

Selanjutnya, *ketiga* adalah membangun sikap saling pengertian. Dalam upaya penanaman nilai-nilai HAM, Proses pembelajaran PAI harus mendorong peserta didik dengan berbagai etnik dan latar belakang untuk dapat memelihara rasa saling pengertian baik dengan teman sejawat maupun dengan anggota masyarakat lain yang berbeda latar belakang. Saling pengertian berarti kesadaran bahwa nilai-nilai mereka dan kita dapat berbeda dan mungkin saling melengkapi serta berkontribusi terhadap keharmonisan hubungan. Selain saling memahami pembelajaran PAI yang dijiwai dengan nilai-nilai HAM, juga harus diarahkan pada mendorong siswa siap menerima perbedaan di antara berbagai keragaman paham agama dan kultur masyarakat yang beragam.

Kemudian *keempat* adalah menjunjung sikap saling menghargai (*Mutual Respect*). Maksudnya adalah pembelajaran PAI harus mengarahkan peserta didik agar memiliki sikap saling menghargai terhadap semua orang, apapun latar belakangnya. Sikap ini muncul jika seseorang memandang orang lain

---

<sup>9</sup> Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana dan ICCE, 2003), hal. 170.

secara setara. Pada kenyataannya ajaran agama yang terkandung dalam PAI memang mengajarkan Muslim untuk menghormati dan menghargai sesama manusia. Inilah ajaran universal yang mestinya ditonjolkan. Pembelajaran PAI diharapkan mampu menumbuhkembangkan kesadaran pada peserta didik bahwa kedamaian dan harmoni dalam kehidupan masyarakat hanya akan tumbuh jika sikap saling menghormati dan menghargai benar-benar diamalkan dalam kehidupan, bukan sikap saling merendahkan. Sikap saling menghargai akan melahirkan sikap saling berbagi di antara semua individu maupun kelompok sosial.

Para siswa mungkin saja telah mengerti tentang hak untuk dihargai dan cara menghargai. Akan tetapi, konstruksi *social-cultural* secara tak sadar telah membawa mereka berfikir secara bias, terutama dalam memandang kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Ketaksadaran ini kelak bisa saja mempengaruhi sikap mereka dalam memandang relasi antara laki-laki dan perempuan kelak sehingga berakibat terabaikannya pemberian hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Sehubungan dengan hal di atas, maka pembelajaran PAI harus memperkenalkan konsep gender dalam Islam. Gender merupakan konsep *cultural* yang berkembang di masyarakat yang berupaya membuat perbedaan peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut sudah lama melekat dalam pandangan umum masyarakat sehingga melahirkan anggapan bahwa perbedaan peran tersebut sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Hal ini telah menimbulkan ketimpangan pola hubungan dan peran *social* antara laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, perempuan identik dengan urusan *domestic*, sementara laki-laki sebaliknya, kedudukan lelaki lebih tinggi daripada perempuan karena lelaki dianggap lebih cerdas, kuat, dan *professional*.

Dalam konteks pembelajaran PAI, perlu ditekankan bahwa semua anggapan superioritas laki-laki tidak lain merupakan produk budaya belaka. Produk atau konstruk budaya tentang gender tersebut telah melahirkan ketidakadilan gender, sebagaimana terlihat dalam beberapa bentuk

marginalisasi perempuan, subordinasi perempuan, stereotipisasi perempuan kekerasan terhadap perempuan, dan beban ganda.

Marginalisasi perempuan adalah pengucilan atau peminggiran peran perempuan dari kepemilikan akses, fasilitas, dan kesempatan sebagaimana dimiliki oleh laki-laki. Misalnya, kesempatan perempuan untuk meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi cenderung lebih kecil ketimbang laki-laki. Di sector pekerjaan, peminggiran ini biasanya ditemukan dalam bentuk pemberian pekerjaan yang tidak stabil, berupah rendah, dan kurang mengandung keterampilan.

Subordinasi perempuan adalah menempatkan perempuan pada prioritas yang lebih rendah ketimbang laki-laki. Kasus seperti ini kerap terjadi dalam sector pekerjaan, sehingga perempuan sulit memperoleh kesempatan mendapatkan posisi yang sejajar dengan laki-laki. Sementara stereotipisasi perempuan adalah pencitraan perempuan yang berkonotasi negative. Dalam banyak kasus pelecehan seksual, misalnya perempuan sering kali dijadikan penyebab karena pencitraan mereka yang suka bersolek dan menggoda.

Kekerasan terhadap perempuan timbul akibat konstruksi budaya yang telah mengkalkikan asumsi umum bahwa laki-laki adalah pemegang supremasi dan dominasi atas semua sector kehidupan. Dengan demikian, perempuan adalah subordinat dan harus mengakui laki-laki sebagai tindakan yang benar walaupun hal itu pada kenyataannya adalah salah.

Dan yang lebih ironis lagi, perempuan seringkali diberi beban ganda. Munculnya pandangan bahwa perempuan sebagai makhluk Tuhan kelas dua yang dibentuk oleh dominasi laki-laki, pada akhirnya memarginalkan peran perempuan yang seharusnya diperlakukan setara sebagai manusia yang memiliki kesamaan hak dan kewajiban. Perempuan, selain menjalankan fungsi reproduksi seperti hamil, melahirkan, dan menyusui, mereka juga masih dibebani pekerjaan domestic lainnya, seperti memasak, mengurus keluarga, dan sebagainya. Pada bagian masyarakat lain, para perempuan ini juga dibebani pekerjaan non-domestik, seperti mencari nafkah untuk keluarganya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

Bila pembelajaran PAI telah memasukkan konsep gender sejak awal, maka prinsip paradigmatik Penumbuhan sikap saling menghargai (*Mutual Respect*) akan mampu menguatkan pemahaman siswa tentang konsep saling menghargai, tidak saja sebagai sesama warga Negara yang berlainan agama, tetapi juga menghargai hak sesama makhluk Tuhan; laki-laki dan perempuan.

*Kelima*, terbuka dalam berpikir. Sikap keterbukaan dalam berpikir pada peserta didik merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan secara umum. Demikian pula dalam PAI berwawasan HAM, hendaknya mendorong siswa membuka diri terhadap kenyataan hidup yang beragam, khususnya dalam hal pemahaman agama. Siswa perlu disiapkan untuk berhadapan dengan model pemahaman agama yang berbeda dari apa yang diajarkan selama ini. Dengan sikap terbuka ini siswa diharapkan mau memahami makna eksistensi dirinya, identitasnya di tengah keragaman budaya dan agama yang ada.

Kemudian, *keenam* apresiasi dan Independensi. Maksudnya adalah PAI berwawasan HAM juga perlu menghadirkan sikap apresiatif terhadap keragaman dan menyadarkan tentang adanya saling kebergantungan atau interdependensi antara satu manusia dengan yang lain. Dan *ketujuh* adalah resolusi konflik dan rekonsiliasi nirkekerasan. Konflik dengan latar belakang sebab yang beragam (baik karena agama, etnik maupun lainnya) adalah fakta kehidupan yang sulit dibantah keberadaannya. Pembelajaran PAI berwawasan HAM memberi kontribusi bagi upaya mengantisipasi munculnya konflik ini dengan cara menyuntikkan kekuatan spiritual yang menjadi sarana integrasi dan kohesi sosial dan menawarkan bentuk-bentuk resolusi konflik. Resolusi kemudian dilanjutkan dengan rekonsiliasi yang merupakan upaya perdamaian melalui pengampunan atau pemaafan. Pembelajaran PAI berbasis HAM perlu mengarahkan peserta didik agar menjadi manusia yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, meskipun tahu bahwa pendekatan hukum juga dapat dilakukan. Akan tetapi memberi maaf jauh lebih luhur dan mulia.

Dengan memahami asumsi-asumsi paradigmatik di atas, maka apa yang dimaksud dengan membangun pembelajaran PAI berbasis HAM dapat

didefinisikan sebagai gerakan pembaruan dan inovasi pendidikan agama dalam rangka menanamkan kesadaran akan pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai HAM yang sejatinya merupakan nilai-nilai Islam itu sendiri, yakni membangun kesadaran hidup bersama dalam keragaman dan perbedaan agama-agama, dengan spirit kesetaraan dan kesederajatan, saling percaya, saling memahami dan menghargai persamaan, perbedaan dan keunikan agama-agama, terjalin dalam suatu relasi dan independensi dalam situasi saling mendengar dan menerima perbedaan perspektif agama-agama dalam satu dan lain masalah dengan pikiran terbuka, untuk menemukan jalan terbaik mengatasi konflik antaragama dan menciptakan perdamaian melalui sarana pengampunan dan tindakan nirkekerasan.

#### **E. Penutup**

Membangun Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) berwawasan HAM penting ditawarkan antara lain karena kecenderungan problematika sosial yang muncul hingga saat ini memperlihatkan bahwa para penganut agama mempunyai perilaku yang mengarah pada pengabaian terhadap nilai-nilai HAM, misalnya bersikap intoleran terhadap penganut agama lainnya, eksklusif, egois, *close-minded*, dan diskriminatif terhadap kelompok minoritas, serta banyak lagi kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya. Menghadapi kehidupan masyarakat yang demikian ini, perlu dimulai dari perubahan paradigma pembelajaran dalam PAI, dengan mendisain materi dan proses pembelajarannya melalui muatan dan strategi yang berwawasan HAM.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Amin. 2001. "Problem Epistemologis-Metodologis Pendidikan Agama" dalam Munir Mulkhan, dkk, *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren, Religiusitas Iptek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Abrasyi, M. Athiyah. 1996. *Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam*. Terj: Syamsuddin Ashrafi. Yogyakarta: Titian Ilhai Press.



- Azra, Azyumardi. 2001. "Rekonstruksi Kritis Ilmu dan Pendidikan Islam" dalam Munir Mulhan dkk, *Rekonstruksi Pendidikan dan tradisi Pesantren, Religiusitas Iptek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Burhani, Ahmad Najib. 2001. *Islam Dinamis Menggugat Peran Agama membongkar Dokirin Yung Membatu*. Jakarta: Kompas.
- Friere, Paulo. 2001. *Pedagogi Pengharapan*, Terj: A. Widyamartaya. Yogyakarta: Kanisius.
- \_\_\_\_\_, 1999. *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, Pembebasan*. Terj: Agung Prihantoro, dan Fuad Arief Fudiyanto Jogjakatra: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, Komaruddin. 1999. "Memetakan Struktur Keilmuan Islam: Sebuah Pengantar" dalam Fuaduddin dan Cik Hasan Basri (Ed), *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi, Wacana tentang Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Logos
- Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
- Langgung, Hasan. 1992. *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Ludjito, Ahmad. 1996. "Pendekatan Integralistik Pendidikan Agama Islam di Sekolah" dalam Chabib Thaha, Syukur dan Priyono (Pen), *Reformulasi Filsafat Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mastuhu. 2001. *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos.
- Muhaimin, et. al. 2001. *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: Rosdakarya.
- Noer, Kautsar Azhari. 2001. "Plurailsme dan Pendidikan di Indonesia: Menggugat Ketidakberdayaan Sistem Pendidikan Agama" dalam Th. Sumartana, dkk, *Pluralisme Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Interfidei.
- Rahman, Fazlur. 1979. *Menggunakan istilah "memory-work" dan "learning by rote"*, *baca Fazlur Rahman, Alam*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Rahman, Fazlur. 1979. *Alam*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Ratnitzky, Gerad. 1970. *Contemporary School of Meta Science*. Swedia: Berlingska Boktrykeriet.
- Team Pembina Mata kuliah Didaktik Metodik IKIP Surabaya. 1993. *Pengantar Didaktik Metodik Kurikulum PBM*. Jakarta: Rajawali Press.

Ubaidillah, A dan Abdul Rozak. 2003. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana dan ICCE.

Widyastuti, "Mendiskusikan Pendidikan Pemanusiaan", *Kedaulatan Rakyat*, 3 Mei 2002.